

**KEKUASAAN KEPALA PEMERINTAHAN
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN PRESIDEN SOEKARNO (1959-1965)
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

YANA SURYANA

01371027 STATE ISLAM UNIVERSITY
SKRIPSI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING

- 1. DRS. H. KAMSI, MA.**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI, M.Si.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Drs. H. Kamsi, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Yana Suryana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Yana Suryana
NIM : 01371027
Judul Skripsi : "**Kekuasaan Kepala Pemerintahan Masa Demokrasi
Terpimpin Presiden Soekarno (1959-1965) Perspektif
Fiqh Siyasah**"

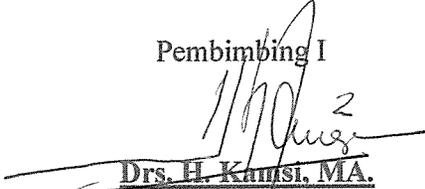
sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Rajab 1428 H
25 Juli 2007 M

Pembimbing I


Drs. H. Kamsi, MA.

NIP. 150 231 514

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

"Kekuasaan Kepala Pemerintahan Masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno (1959-1965) Perspektif Fiqh Siyash"

Yang disusun oleh :

Yana Suryana
01371027

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 08 Agustus 2007 M / 24 Rajab 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Rajab 1428 H
12 Agustus 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 150 289 435

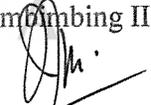
Sekretaris Sidang


Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 150 289 435

Pembimbing I


Drs. H. Kamsi, M.A.
NIP. 150 231 514

Pembimbing II


Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 150 252 260

Penguji I


Drs. H. Kamsi, M.A.
NIP. 150 231 514

Penguji II


H. Muhammad Nur, S.Ag., M. Ag.
NIP. 150 282 522

Motto

*Berapa lamakah kau tetap
Mengelepar menggantung di sayap orang ?
Kembangkan sayapmu sendiri
Dan terbanglah lepas
Seraya menghirup
Udara bebas di taman luas*

*Yang terpenting bukanlah panjang pendeknya Usia
Seseorang
Tetapi arah dan kualitas hidup itu sendiri
Sebuah kehidupan yang berlarut-larut tanpa arah dan tujuan yang
jelas
Justru akan merupakan beban sejarah
Ketimbang kebanggaan*

(Dr. Sir Muhammad Iqbal)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan

Kehadapan merekalah karya yang sederhana ini ku persembahkan

Kedua orang tuaku

*Yang senantiasa sabar mengajari arti kehidupan untuk masa depanku,
yang selalu membimbingku dengan kasih sayangnya,
serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.*

*Kakak-kakakku beserta seluruh keluarganya yang senantiasa menyayangi dan
memperhatikanku.*

Adikku tersayang tempat aku berbagi.

Keluarga besar ayah dan ibuku yang selalu mensupportku

*Seseorang yang selalu memberi harapan untuk hidup bersama dimasa yang akan
datang. Dan*

Almamaterku: Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد و علي وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul KEKUASAAN KEPALA PEMERINTAHAN MASA DEMOKRASI TERPIMPIN PRESIDEN SOEKARNO (1959-1965) PERSPEKTIF FIQH SIYASAH ini. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Dengan penuh kerendahan hati, penyusun menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa tersusun bila tanpa petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini bisa terselesaikan. Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung terselesainya penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bpk. Drs.H. A, Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya
2. Bpk. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
3. Bpk. Drs. H. Kamsi MA, selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

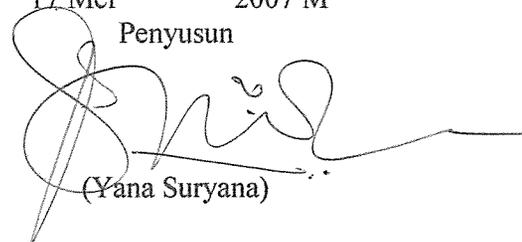
4. Bpk. Drs. Slamet Khilmi, M.Si, sebagai pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bpk. Drs. Oman Faturrahman, MA. selaku Penasehat Akademik
6. Teman-teman IMM baik yang berada dalam Pimpinan Komisariat yang ada di UIN Sunan Kalijaga terutama Fakultas Syari'ah, Yogyakarta yang telah memberikan pelajaran hidup dalam berproses.
7. Sahabatku Munawar, Usman, Niam, Ade, Kurnia yang selalu memberikan motivasi, semangat, masukan dan bertukar pikiran dalam penyusunan skripsi bersamamu penyusun merasa hidup.
8. Sahabatku Teguh, Umam, Hilal, Lelis, Rahmah, Cici, Evi komunitas Darul Mahabbah dkk IRMALIS, adek-adeku TPA beserta jamaah Masjid Nurul Islam Pedak Baru yang telah mengisi pengalaman saya dalam memahami dan memaknai sebuah potret realitas sosial, keagamaan menuju proses kehidupan.

Serta masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu, untuk itu penyusun juga mengucapkan banyak terimakasih. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan di balas oleh-Nya, *'amin ya rab al-'alamin*.

Yogyakarta, 24 Rabiul Akhir 1428 H.

17 Mei 2007 M

Penyusun



(Yana Suryana)

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	ṣā	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan rangkap atau diflong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yaẓhabu
 سئل -su'ila ذكر - ẓukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan alif atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas

ي Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - raudaḥ al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un امرت - umirtu
النوء - an-nau'u تأخذون - ta'khuḏūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al-kaila wa al-mīzāna atau
Fa 'aufūl – kaila wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمٌ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu

الْجَلَالُ - al-jalālu

الْبَدِيعُ - al-badi'u

7. Hamzah

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl
إنّ أوّل بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb
لله الأمر جميعاً - lillāhi al-amaru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Era demokrasi terpimpin (*guided democracy*) 1959-1965, adalah suatu fase politik dalam perjalanan sejarah negeri ini, era ini diawali ketika Presiden Soekarno mengajukan usulan yang dikenal sebagai "Konsepsi Presiden" tanggal 21 Februari 1957, dan mengeluarkan dekritnya yang terkenal yaitu dengan "Dekrit Presiden 5 Juli 1959."

Ekses langsung dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah ketika Soekarno mencanangkan demokrasi terpimpin, yang pada pelaksanaannya, Presiden sebagai eksekutif atau kepala pemerintahan berusaha memusatkan semua pemerintahan ke satu tangan yaitu Presiden sendiri. Akibatnya kekuasaan Presiden berada di atas kekuasaan semua lembaga negara yaitu, dengan mengangkat para pejabat tinggi menjadi menteri seperti ketua MPRS, ketua DPR-GR (legislatif), wakil ketua DPA, ketua DPN dan ketua MA (yudikatif), yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan mengangkat sepenuhnya DPR baru serta MPR.

Melihat peristiwa tersebut, perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kekuasaan kepala pemerintahan yang dibangun dan yang menjadi pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah bagaimana kekuasaan kepala pemerintahan era demokrasi terpimpin Soekarno dalam perspektif *fiqh siyāsah*.

Guna mendapatkan kejelasan sejarah dan hasil yang maksimal, dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif dan historis. Pendekatan normatif dimaksudkan suatu usaha untuk menjelaskan kekuasaan kepala pemerintahan masa demokrasi terpimpin, manakala menelaah dari sisi hukum Islam (*fiqh siyāsah*). Adapun pendekatan historis yaitu menelaah kekuasaan Presiden Soekarno masa demokrasi terpimpin dari segi politik dan secara historis berusaha menggambarkan dan memaparkan perjalanan demokrasi terpimpin (1959-1965). Dengan demikian, gambaran pelaksanaan kekuasaan kepala pemerintahan masa tersebut akan ditelaah, sepanjang peristiwa tersebut.. Kemudian data yang terkumpul di analisis dalam perspektif *fiqh siyāsah* secara kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa kekuasaan kepala pemerintahan masa demokrasi terpimpin Soekarno telah melampaui kekuasaan kepala pemerintahan yang semestinya telah diatur dalam konstitusi (UUD 1945) sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, sementara dalam pelaksanaannya semua kekuasaan lembaga negara berada di bawah kendalinya. Dengan demikian, apabila dilihat dari perspektif *fiqh siyāsah*, maka kekuasaan kepala pemerintahan masa demokrasi terpimpin Soekarno telah menyalahi prinsip-prinsip pemerintahan Islam, seperti prinsip *syūrā*, *al-musawāh* (*persamaan*), *al-adālah* (*keadilan*), *al-hurriyah* (*kebebasan*), dan amanat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I . PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II . TINJAUAN UMUM TENTANG KEKUASAAN	
KEPALA PEMERINTAHAN DALAM FIQH SIYASAH	20
A. Pengertian dan Sumber Kekuasaan.....	20
B. Pembagian Kekuasaan Pemerintahan dalam Fiqh Siyasah.....	25

C. Kekuasaan Kepala Pemerintahan Masa Nabi Muhammad SAW dan Masa Empat Khulafa al-Rasyidin	28
1. Masa Nabi Muhammad SAW	28
2. Masa Empat Khulafa al-Rasyidin	31
D. Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Islam	40

BAB III. KEKUASAAN KEPALA PEMERINTAHAN MASA

DEMOKRASI TERPIMPIN PRESIDEN SOEKARNO (1959-1965)

A. Latar Belakang Munculnya Demokrasi Terpimpin	45
1. Peta Politik	45
2. Proses Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959	48
B. Kekuasaan Kepala Pemerintahan dan Implementasinya.....	56
1. Bidang Eksekutif	58
2. Bidang Legislatif	61
3. Bidang Yudikatif	69

BAB IV. ANALISIS ATAS KEKUASAAN KEPALA PEMERINTAHAN ERA DEMOKRASI TERPIMPIN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Kekuasaan di Bidang Eksekutif	72
B. Kekuasaan di Bidang Legislatif	79
C. Kekuasaan di Bidang Yudikatif	85

BAB V. PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran-Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
2. BIOGRAFI ULAMA/TOKOH	IV
3. CURRICULUM VITAE	VII





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**KEKUASAAN KEPALA PEMERINTAHAN
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN PRESIDEN SOEKARNO (1959-1965)
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara ditinjau dari perspektif hukum tatanegara merupakan suatu organisasi kekuasaan.¹ Merujuk pada pendapat aliran modern, yang dikemukakan oleh Krenenburg dan Logemann, sebagaimana dikutip oleh Soehino, bahwa negara pada hakekatnya adalah organisasi kekuasaan. Negara itu lahir atau berdiri sudah dengan sendirinya mempunyai kekuasaan yang disebut kekuasaan negara.²

Menurut Max Weber negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.³ Sementara menurut Roger H. Soltaut negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.⁴ Sementara menurut Harold J. Laski negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan, karena mempunyai kekuasaan yang bersifat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

¹ Kekuasaan adalah kemampuan orang atau golongan untuk menguasai, memerintah, mengurus orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hlm. 468.

² Soehino, *Hukum Tatanegara Sumber-Sumber Hukum Tatanegara Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 84.

³ Sulistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, cet. ke-2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 61.

⁴ Emon Hermawan, *Politik Membela yang Benar: Teori, Kritik dan Nalar*, (Yogyakarta: Klik®, 2001), hlm. 12.

memaksa, dan secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.⁵

Di negara-negara dunia ketiga atau negara sedang berkembang, seperti negara Indonesia, dalam sistem pengelolaan pemerintahan belum sepenuhnya mengikuti apa yang oleh Weber sebagaimana dikutip oleh Sorjono Soekamto di sebut kekuasaan "*legal rasional*".⁶ Hal ini terlihat dari pengalaman kekuasaan kepala negara di Indonesia pada era Presiden Soekarno yaitu masa demokrasi terpimpin (1959-1965).⁷

Berbicara tentang kekuasaan negara dalam suatu pemerintahan sangat luas. Oleh karena itu, agar pembahasan tidak melebar, penyusun membatasi pada kekuasaan kepala pemerintahan. Dan yang dimaksud kepala pemerintahan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai penyelenggara pemerintahan negara republik yang lebih lazim disebut Presiden.⁸

Semua wewenang berkaitan erat dengan hak moral untuk menentukan kebijakan, membuat penilaian, mengeluarkan perintah dan menyelesaikan konflik,

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. ke-24. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 39.

⁶ Kekuasaan *legal rasional* atau legal adalah kekuasaan yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, dimana sumber hukum disini difahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati masyarakat bahkan telah diperkuat oleh negara. Lihat, Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. ke-18, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 313.

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar*, hlm106.

⁸ Presiden merupakan jabatan amat penting dalam suatu negara yang berbentuk republik, kedudukannya adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jabatan Presiden merupakan jabatan tunggal, yaitu diisi oleh satu orang pemangku jabatan. Pemangku jabatan Presiden disebut Presiden. Lihat buku Bambang Cipto, *Presiden, Partai dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 7.

semua kegiatan ini melibatkan penggunaan kekuasaan, prinsip-prinsip moral yang memberikan pembenaran pada wewenang (hak menjalankan kekuasaan) cenderung lebih spesifik dari pada nilai-nilai umum.

Tujuan wewenang adalah untuk mengatur tingkah laku penguasa maupun yang di kuasai. Prinsip-prinsip itu memberikan batas-batas tertentu tentang bagaimana seorang pemimpin atau kepala pemerintahan menjalankan kekuasaannya, tetapi juga memberinya hak untuk memakai sumber daya dengan cara-cara tertentu. Dengan demikian, maka prinsip-prinsip wewenang mempengaruhi cara bagaimana tujuan kekuasaan dicapai dan nilai-nilai terwujud.⁹

Sehubungan dengan kekuasaan tersebut di atas, penyusun mencoba menjadikan episode demokrasi terpimpin sebagai “laboratorium” penyelidikan tentang kekuasaan Presiden yang dilaksanakan oleh Soekarno, yang sekaligus menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan negara Indonesia.¹⁰

Terlepas dari keberhasilan Soekarno dalam mewujudkan iklim kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka. Masa pemerintahannya telah meninggalkan segudang polemik dan kontroversi, baik di pandang dari perspektif Hukum Tata Negara (HTN) dan Undang-undang Dasar 1945 yang berlaku di Indonesia, terutama aspek yang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan kepala pemerintahan, maupun *fiqh siyāsah*.

⁹ Charles F. Andrain. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Terj. Lukman Hakim, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 192.

¹⁰ Cara membedakan Presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan adalah melalui tugas dan tanggung jawab yakni tugas dan tanggung jawab kepala Negara sebagai kepala protokoler kenegaraan dan seremonial sedangkan tugas kepala pemerintahan yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan (eksekutif). Lihat buku Inu Kencana, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*, cet. ke-1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 208.

Soekarno adalah sosok figur kontroversial, ia senantiasa berada di tengah-tengah kontroversi politik ideologis dan pemikiran yang luar biasa berlangsung terus-menerus, hingga singgah di puncak kekuasaan dan menjadi bagian yang permanen dari peta pergulatan politik di sepanjang sejarah Indonesia hingga berakhir masa kekuasaanya di tahun 1965.¹¹

Era demokrasi terpimpin (*guided democracy*) 1959-1965, adalah suatu fase politik dan realitas ketatanegaraan dalam perjalanan sejarah negeri ini, dengan tokoh utamanya ialah Presiden Soekarno. Sebagai langkah awal dibukanya gerbang era tersebut ialah ketika Presiden Soekarno mengajukan usulan yang dikenal sebagai "Konsepsi Presiden" tanggal 21 Februari 1957, kemudian mengeluarkan dekritnya yang terkenal dengan "Dekrit Presiden 5 Juli 1959."¹²

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-Undang Dasar 1945 telah kembali dan meninggalkan UUD sementara 1950. dan berakhir pulalah riwayat demokrasi parlementer (demokrasi liberal) di Indonesia.¹³ Dekrit ini pula membantu "menyelesaikan" beberapa masalah yang terjadi di dalam negeri ini, yaitu: *Pertama*, menyelesaikan perdebatan alot dan melelahkan

¹¹ Agus Sudibyo, *Citra Bung Karno "Analisis Berita Pers Orde Baru"*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1999), hlm. 8.

¹² Dekrit adalah suatu keputusan dari penguasa tertinggi (Presiden atau Raja) secara sepihak dan bertentangan atau mengubah peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan Undang-Undang Dasar demi keselamatan bangsa dan negara. Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 201.

¹³ Pada tahun 1955-1958, masyarakat Indonesia diliputi suasana frustrasi dan kegelisahan sosial, politik, karena kepincangan-kepincangan yang terjadi di bidang politik sangat terasa pada masa demokrasi parlementer. Adanya instabilitas politik, ketegangan antara politisi sipil dan kalangan militer, parlemen dengan pemerintah, kebijakan politik luar negeri, kekacauan ekonomi dalam negeri, hubungan pusat dan daerah, serta keamanan dalam negeri.

mengenai dasar negara dengan "kembali ke UUD 1945" yang berarti Indonesia bukan negara agama, *kedua*, mengalihkan kekuasaan dari parlemen kepada eksekutif yang berarti memberikan legitimasi pada kekuasaan Soekarno, dan *ketiga*, membubarkan Majelis Konstituante.

Pengaruh besar dari dekrit tersebut ialah pada status Presiden Soekarno yang dalam demokrasi parlementer hanya berfungsi sebagai simbol, namun pada periode demokrasi terpimpin (1959-1965), sesuai dengan Konsep Presiden 12 Februari 1957, Presiden berusaha memusatkan semua pemerintahan ke satu tangan yaitu Presiden sendiri, dengan mengangkat para pejabat tinggi seperti ketua MPRS, ketua DPR-GR (legislatif), wakil ketua DPA, ketua DPN dan ketua MA (yudikatif) sebagai menteri, yang seharusnya mempunyai fungsi kekuasaan yang berbeda.

Kemudian yang lebih luar biasa lagi yaitu ketika Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan mengangkat sepenuhnya DPR baru serta MPR, selain itu Soekarno juga diangkat oleh MPRS sebagai Presiden seumur hidup. Akibatnya kekuasaan Presiden berada di atas kekuasaan semua lembaga negara, yang seharusnya merupakan lembaga tertinggi di Indonesia.¹⁴ Sehingga Presiden menjadi pusat seluruh kekuasaan berada di bawah kendalinya. hal ini jelas, bertolak belakang dengan apa yang diatur dalam UUD 1945 tentang kekuasaan kepala pemerintahan baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun bidang yudikatif.

Melihat sekelumit peristiwa di sepanjang kekuasaan Presiden Soekarno era demokrasi terpimpin, penyusun merasa tertarik untuk menjelaskan lebih lanjut

¹⁴ Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet*, hlm. 204.

dari sisi yang berbeda dengan mengambil pokok masalahnya yaitu bagaimana perspektif *fiqh siyāsah* melihat kekuasaan kepala pemerintahan yang dibangun pada era demokrasi dipimpin Presiden Soekarno.

Penyusun akan mengkaji tema tersebut (kekuasaan kepala pemerintahan) dari kacamata *fiqh siyāsah* dengan mengambil pandangan para pemikir Islam klasik maupun modern yang telah memunculkan gagasan-gagasan baru sesuai dengan alam politik yang berkembang. Diantaranya ialah, al-Mawardi, al Maududi, Ibnu Taimiyah, Fazlur Rahman dan pemikir Islam lainnya, yang mencoba memberikan perhatian dalam hal kekuasaan kepala pemerintahan (politik) dalam Islam.

Menurut Ibnu Taimiyah tujuan yang harus direalisasikan dalam setiap kekuasaan para penguasa, yaitu seorang kepala pemerintahan yang mencurahkan segenap daya upayanya guna memperbaiki kondisi spiritual dan sosial rakyatnya.¹⁵ Sedangkan menurut Quthub bahwa kekuasaan seorang penguasa dalam Islam didasarkan atas tiga asas, yakni keadilan penguasa, ketaatan rakyat dan permusyawaratan antara penguasa dan rakyat.¹⁶

Jadi seorang kepala pemerintahan dituntut dalam menggunakan kekuasaannya untuk memecahkan persoalan-persoalan kenegaraan yang memang selalu berkembang, meskipun demikian pemecahan-pemecahan terhadap masalah tersebut (melalui ijtihad) tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan al-hadis.

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *Siyāsah Syar'iyah "Etika Politik Islam"*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 21.

¹⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm.150.

B. Pokok Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah kekuasaan kepala pemerintahan masa demokrasi dipimpin Soekarno (1959-1965)?
2. Bagaimana pandangan *fiqh siyāsah* terhadap kekuasaan kepala pemerintahan masa demokrasi dipimpin Soekarno (1959-1965)?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Menjelaskan tentang kekuasaan kepala pemerintahan masa demokrasi dipimpin Soekarno (1959-1965) perspektif *fiqh siyāsah*.
- b. Menguraikan realitas politik ketatanegaraan yang terjadi di masa demokrasi dipimpin. Hal ini sangat penting, karena sejarah ketatanegaraan suatu negara yang memiliki pemahaman dalam kekuasaan kepala pemerintahan secara periodik mengalami perubahan setiap adanya pergantian kepala pemerintahannya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menambah khasanah keilmuan khususnya dalam hal kekuasaan kepala pemerintahan dalam perspektif

fiqh siyāsah studi terhadap kekuasaan kepala pemerintahan masa demokrasi terpimpin Soekarno (1959-1965).

- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembaharuan dan pengembangan sistem tata negara di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian tentang Soekarno telah banyak diteliti, namun kekuasaan kepala pemerintahan masa demokrasi terpimpin Soekarno (1959-1965) dalam pandangan *fiqh siyāsah* belum ada, dan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki sesuai dengan topik permasalahan, penyusun tidak melepaskan diri dari hasil penelitian para peneliti terdahulu sebagai pendukungnya. Berikut ini akan dikemukakan beberapa karya para peneliti :

1. Buku yang ditulis oleh Mr. S.M. Amin, *Indonesia Di Bawah Rezim "Demokrasi Terpimpin"*,¹⁷ dalam buku ini dibahas secara tajam tentang sepak terjang politik Soekarno selama menjabat sebagai Presiden masa demokrasi terpimpin.

2. Buku yang ditulis oleh Darmawan M.M dengan judul "*Sukarno Bapak Bangsa Indonesia*". Dalam buku ini mencoba menampilkan tentang riwayat hidup Sukarno dari masa pembentukan yang menyangkut kehidupan pribadi Sukarno

¹⁷ Amin, S.M, *Indonesia Di Bawah Rezim "Demokrasi Terpimpin"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).

sampai pada masa membangun negara dan mempertahankan keutuhan bangsa hingga terbentuknya demokrasi terpimpin.¹⁸

3. Buku yang berjudul *Islam dan Politik "Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Karya Ahmad Syafii Maarif menjelaskan kiprah politik kaum muslimin terutama tingkah laku politik partai-partai Islam pada periode demokrasi terpimpin (1959-1965), dimana dengan sistem baru ini menyebabkan partai-partai Islam harus menempuh jalan bersibak dua. Terlibat dalam sistem baru ini dan bisa terus hidup atau mati dikubur sebagai kontra revolusioner.¹⁹

4. Panji Nugraha Ruhiat dalam skripsinya yang berjudul Dekrit Presiden dalam HTN di Indonesia ditinjau dari perspektif *fiqh siyāsah*. Menjelaskan bahwa wewenang seorang kepala negara (Presiden) dalam menyatakan bahaya (Dekrit) berupa berupa pembubaran parlemen haruslah berdasarkan pada undang-undang yang sedang berlaku dan berdasarkan pada keadaan terpaksa atau darurat.²⁰

5. Skripsi yang berjudul demokrasi terpimpin menurut Idham Khalid perspektif *fiqh siyāsah*, yang disusun oleh Ahmad Muhajir menjelaskan pemikiran yang memandang bahwa demokrasi terpimpin Soekarno tidaklah bertentangan dengan ideologi Islam, selain karena alasan-alasan politis. Idham beralasan bahwa konsep demokrasi terpimpin tersebut yang menonjolkan musyawarah mufakat

¹⁸ Darmawan M.M, *Sukarno Bapak Bangsa Indonesia*, cet. ke-1, (Bandung: CV. Hikayat Dunia, 2005).

¹⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik " Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965,* " (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

²⁰ Panji Nugraha Ruhiat, *Dekrit Presiden dalam HTN di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

sejalan dengan *syūrah*, dengan pemikiran tersebut Idham melegitimasi keputusan NU untuk mendukung sistem demokrasi terpimpin.²¹

E. Kerangka Teoretik

Prinsip dasar Islam tentang pengaturan kehidupan publik bermasyarakat, termasuk dalam berbangsa dan bernegara (*as-siyāsh wa ad – dunya*) adalah mewujudkan kemaslahatan umum (*al – maslahah al – ammah*). Tujuan substansif universal disyari'atkannya hukum-hukum agama adalah mewujudkan kemaslahatan manusia.²²

Munawir Sjadzali mengemukakan bahwa dalam al-Qur'an terdapat nilai-nilai yang menjadi inspirator dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, meliputi prinsip musyawarah, persamaan (keadilan), ketaatan kepada pemimpin dan kebebasan beragama.²³ Untuk mewujudkan stabilitas yang dicita-citakan oleh suatu kekuasaan negara, diperlukan adanya pemimpin atau kepala pemerintahan.

Kepala pemerintahan dalam kajian *fiqh siyāsh* disebut juga *khalīfah*, secara *etimologis* kata *khalīfah* berasal dari kata dasar atau masdar dari *fi'il madly kholafa*, yang berarti menggantikan atau menempati tempatnya sedang bentuk

²¹ Ahmad Muhajir, *Demokrasi Terpimpin menurut Idham Khalid Perspektif Fiqh Siyash*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

²² Umarudin Masdar, *Membaca Pikiran Gusdur Dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 13.

²³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 4.

jamaknya *khulafa khalā'if* yang mempunyai arti primer “pengganti” yaitu seseorang yang menggantikan tempat dalam beberapa persoalan.²⁴

Kepala pemerintahan dalam *terminologi* disebutkan *khalīfah*, *imam* dan *amir*, pada dasarnya merupakan sebutan atau gelar bagi seseorang yang melaksanakan fungsi kekhilafahan keimaman, dan keamiran dalam sejarah Islam.²⁵

Kekuasaan yang dipegang oleh seorang kepala pemerintahan dalam Islam, menurut al-Maududi hanyalah sebatas pada upaya untuk menegakkan agama dan mengatur dunia, segala kebijakan yang diberlakukan tidak diperkenankan bertentangan dengan hukum Allah dan inilah oleh al-Maududi disebut bahwa pemimpin adalah wakil Allah di bumi, yaitu dalam pengertian untuk menegakkan keadilan dan kebenaran diantara umat manusia.²⁶

Kepala pemerintahan dalam Islam menurut Fazlur Rahman, hanya sebagai pelaksana eksekutif, dimana kepala pemerintahan merupakan pusat dari segala kekuasaan eksekutif, kekuasaan sipil dan militer, serta sistem lembaga pemerintahan yang terpusat.²⁷

²⁴ A. Warson Munawir, *Kamus al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif 1997), hlm. 362.

²⁵ Dari sebutan tersebut masing-masing berbeda masanya, dengan munculnya dan sebab-sebab yang menimbulkan gelar-gelar tersebut berlainan, namun akhirnya semuanya mengarah kesatu tujuan untuk mencari arti yang sama, yakni sebutan bagi seorang penguasa yang memimpin negara Islam.

²⁶ Al-Maududi, *Politik Alternatif “Suatu Perspektif Islam”*. Terj. Moh Nor Hakim (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 58.

²⁷ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 98.

Demi terciptanya perdamaian walau itu harus berada dalam suatu kekuasaan yang otoriter, kemudian Fazlur Rahman menelorkan konsep, bagaimanapun seorang penguasa bertindak melanggar jangan sampai kita berbuat oposisi dan berusaha untuk melawannya, dia harus tetap kita taati dan dipatuhi.²⁸ Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw :

اسمع والطاعة غلي المرء المسلم فيما احب كرهه مالم يؤمر بمعصية فإذا امر بمعصية فل اسمع ولا طاعة²⁹

Menurut Imam al-Mawardi ketika kepala pemerintahan telah menunaikan wewenangnya berarti ia telah menunaikan hak-hak Allah, ketika itu ia memiliki dua hak atas rakyat yaitu hak ketaatan dan hak dibela, selama imam tidak menyimpang dari garis keimamahan atau selama kepala pemerintahan masih berpegang teguh pada nas-nas syari'at, maka patuh dan taat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap warga. Namun ketika seorang Imam atau kepala pemerintahan telah menyimpang dari amanah hak-hak ummat yang telah diberikan berarti dia harus diturunkan dari jabatannya.³⁰

Kepala pemerintahan sebagai konsuekuensi dari kewajiban sebagai pemegang jabatan kekuasaan kepala pemerintahan, seperti yang diketengahkan

²⁸ Jasilatul Helmhiah, Pemikiran Fazlur Rahman tentang Konsep Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), hlm. 56

²⁹ Abu Abdullāh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhāri. *Sahih al-Bukhāri*, "Kitab al-Ahkam", Bab Assm'u wa attā'ati al Imām mālam takun ma'siatan, (Kairo: Dar el-Fikr, 1981), VIII: 205. Hadis Sahih dari Musaddad dari Yahya bin Sa'id dari Ubaidillāh dari Nafi' dari Abdillāh.

³⁰ Abi Hasan Ali Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi al-Mawardi, *Al-Ahkām as-Sultāniyyah Wa al-Wilāyah ad-Dniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), hlm. 19.

oleh al-Mawardi, bahwa seorang kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan yang diamanahkan kepadanya dalam mengurus negara, yaitu menjaga negara dari malapetaka yang dapat merugikan hidup orang banyak, sehingga dengan demikian segala perbuatan seseorang kepala pemerintahan haruslah membawa kemaslahatan bagi rakyatnya.³¹

Secara garis besarnya, landasan konstitusional kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan proses kehidupan bernegara harus mencerminkan prinsip-prinsip *fiqh siyāsah*, diantaranya ialah:

1. *As-syūra* (musyawarah), yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan haruslah mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan bersama, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Landasannya firman Allah SWT yaitu:

وامرهم شورى بينهم ..³²

2. *Al-musawah* (kesetaraan) yaitu pandangan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi kesukuan, ras, agama, jenis kelamin dan kelas sosial.³³ Landasan mengenai kesetaraan ini disebutkan dalam al-Qur'an:

³¹ Al-Mawardi, *al-ahkām as-Sulthānīyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Khattani dan Kamaluddin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm.37-38.

³² As-Syūra (42): 38.

³³ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah "Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah"*, cet. ke-1, (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm. 190-191.

ياايهاالناس انا خلقناكم من ذكراوانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

ان اكرمكم عندالله اتقكم...³⁴

3. *Al-adālah* (keadilan), yaitu menetapkan suatu baik berupa hukum, peraturan, dan kebijakan harus sesuai dengan hakikat kebenaran obyektif tanpa pandangan dan kepentingan subyektif. Pelaksanaannya juga harus dilakukan tanpa pandangan keberpihakan.³⁵ Landasan mengenai keadilan ini disebutkan dalam al-Qur'an :

...ولايجرمكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى..³⁶

4. *Al-hurriyyah* (kebebasan) yaitu, adanya jaminan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang benar, bertanggungjawab dan mencerminkan akhlak yang baik.³⁷ Landasan tentang kebebasan ini disebutkan dalam al-Qur'an:

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون..³⁸

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁴ Al-Hujurat (49):13.

³⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 189

³⁶ Al-Maidah (5): 8.

³⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 197.

³⁸ At-Taubah (9): 105.

5. Al-amānat (*responsibility*), yaitu seorang pemimpin pada hakekatnya ia memegang amanat, dan harus dapat melaksanakan serta mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah SWT dan rakyat yang telah memberi kepercayaan padanya. Sebagaimana hadis yang menegaskan :

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته الامام راع ومسئول

عن رعيته...³⁹

Kelima prinsip ini yang menjadi dasar terselenggaranya suatu lembaga kepala negara dalam pemerintahan Islam. Aplikasinya dapat dilakukan lewat kebijakan-kebijakan yang dihasilkan kepala pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dalam bingkai syari'at Islam.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil penelitian yang optimal, sistematis dan metodis dan juga secara moral dapat dipertanggungjawabkan, sebuah penelitian atau penulisan haruslah memiliki metode tertentu, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, dan analisa data.

1. Jenis Penelitian

³⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhāri. *Sahih al-Bukhāri*, "Kitab al-Ahkām", (Kairo: Dar el-Fikr, 1981 H), VIII: 104. Hadis diriwayatkan Ismail dari Malik dari Abdullāh bin Umar.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*),⁴⁰ yaitu mengumpulkan data dan informasi tentang kekuasaan kepala pemerintahan masa demokrasi terpimpin Soekarno, dan kekuasaan kepala negara perspektif *fiqh siyāsah* melalui bahan-bahan material yang terdapat di perpustakaan.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif-inferensial*. Yang di maksud dengan *deskriptif* adalah meneliti gambaran tentang sifat-sifat atau karakteristik suatu peristiwa. Sifat-sifat yang dikaji adalah sifat-sifat beserta peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar tokoh tersebut yang mempengaruhi pemikiran dan tindakannya. Sedangkan yang dimaksud dengan *inferensial* adalah beberapa hipotesa untuk maksud menerima atau memperkuat. Artinya, penelitian ini menelaah tentang kekuasaan kepala pemerintahan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno, selanjutnya dari konsep tersebut dihadapkan pada realita.⁴¹

3. Pengumpulan Data

Data dalam penulisan ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, dimana sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer yang berkaitan dengan kekuasaan kepala pemerintahan masa demokrasi terpimpin Soekarno. Adapun literatur yang dikaji yaitu: Buku yang ditulis oleh Soekarno, *Dibawah Bendera*

⁴⁰ *Library research* adalah suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui sumber-sumber kepustakaan baik dari buku, majalah, surat kabar, maupun karya ilmiah lain yang relevan dengan obyek pembahasan. Dengan artian menjadikan pustaka sebagai landasan sumber utama (primer).

⁴¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 139-140; dan Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum, cet. Ke-2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 15; lihat juga Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

Revolusi, Buku yang berjudul *Bung Karno "Demokrasi Terpimpin Milik Rakyat Indonesia"* (kumpulan Pidato yang disunting Wawan Tunggal Alam), buku-buku tersebut sebagai data primer. sementara data sekundernya penyusun ambil dari berbagai sumber yang mendukung terhadap penyusunan penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan historis,⁴². Pendekatan normatif dimaksudkan suatu usaha untuk menjelaskan kekuasaan kepala pemerintahan masa demokrasi terpimpin, manakala menelaah dari sisi hukum Islam (*fiqh siyāsah*). Adapun pendekatan historis, yaitu menelaah kekuasaan Presiden Soekarno masa demokrasi terpimpin dari segi politik dan secara historis berusaha menggambarkan dan memaparkan perjalanan demokrasi terpimpin (1959-1965).

5. Analisa data

Analisa data merupakan cara yang digunakan untuk mengolah data-data tertentu yang selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang relevan dengan pembahasan yang ada. Tahapan pertama adalah mengklasifikasikan dan mensistемasikan data-data untuk kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang ada. Langkah terakhir melakukan analisis, analisa ini menggunakan metode deduktif yaitu menerangkan dari persoalan yang umum diformulasikan ke khusus, sehingga data-data yang telah diklasifikasikan dengan menggunakan

⁴²Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998), hlm. 105.

teori-teori dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai sehingga memperoleh analisis berdasarkan uraian-uraian yang telah ada.⁴³

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan memiliki alur logika yang sistematis, maka pembahasan dalam penelitian ini menggunakan susunan sebagai berikut :

Pada bab pertama, memuat tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab pertama terdiri dari delapan sub bab pembahasan yaitu, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Setelah selesai, maka memasuki bab ke dua, membahas tentang tinjauan umum pertama tentang kekuasaan kepala pemerintahan. Pada bab ini terbagai menjadi tiga Sub bab, yakni pertama tentang (pengertian kekuasaan dan pembagian kekuasaan), yang kedua tentang kekuasaan kepala pemerintahan masa Nabi Muhammad Saw kekuasaan kepala pemerintahan dalam Islam yaitu pada masa empat khalifah Khulafa al-Rāsyidīn. Dan yang ketiga akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Islam

Dalam bab ke tiga, berisi uraian tentang kekuasaan kepala pemerintahan masa demokrasi terpimpin Presiden soekarno (1959-1965) yang terbagi menjadi dua sub pembahasan meliputi, pertama, tentang latar belakang munculnya demokrasi terpimpin (kondisi sosio-politik dan Dekrit Presiden 5 juli 1959

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 1988), hlm. 36.

menuju demokrasi terpimpin), dan kedua, tentang kekuasaan kepala pemerintahan dan implementasinya masa demokrasi terpimpin Soekarno.

Memasuki pada bab ke empat, merupakan analisa perspektif *fiqh siyāṣah* terhadap kekuasaan kepala pemerintahan yang meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif ala demokrasi terpimpin Presiden Soekarno (1959-1965)

Kemudian setelah menyelesaikan bab ke lima, maka melanjutkan pada bab ke lima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban terhadap pokok masalah, selain itu beberapa saran-saran yang berkaitan dengan kekuasaan kepala pemerintahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jika melihat dari pembahasan yang telah diketengahkan dalam skripsi ini tentang kekuasaan kepala negara masa demokrasi terpimpin Soekarno perspektif *fiqh siyasah*, maka dapat dipetik beberapa kesimpulan seperti dibawah ini :

1. Pelaksanaan kekuasaan kepala pemerintah era demokrasi terpimpin Soekarno, baik di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif, ada beberapa hal dalam tindakannya sebagai eksekutif yang tidak dibenarkan baik dalam konstitusi (UUD 45) yaitu terindikasi terjadinya penumpukan dalam satu lembaga kekuasaan kepala pemerintahan yakni dengan mengangangkat para pejabat tinggi seperti ketua MPRS, ketua DPR-GR, wakil ketua DPA, ketua DPN dan ketua MA sebagai menteri. Kekuasaan di bidang legislatif ada beberapa indikasi penyimpangan dari ketentuan UUD 1945, yaitu dengan banyak dikeluarkannya Penetapan Presiden (Penpres), diantaranya: pembubaran lembaga DPR (legislatif), pengangkatan anggota DPR, pembentukan MPRS, pembubaran partai. Selain itu dalam Pengambilan keputusan jika tidak tercapai proses musyawarah mufakat, dan ketetapan oleh MPRS kepada Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Begitu juga dalam kekuasaan kepala negara di bidang yudikatif, di mana

kekuasaan eksekutif dapat mencampuri urusan kekuasaan Kehakiman, dengan dikeluarkannya UU No. 19 Tahun 1964. Dan UU ini sangat berlawanan dengan penjelasan UUD 1945 (mengenai pasal 24 dan 25 bahwa kekuasaan kehakiman adalah merdeka).

2. Kekuasaan kepala pemerintahan era demokrasi dipimpin Soekarno, baik kekuasaan di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif, apabila dipandang dari perspektif *fiqh siyāsah*, maka kekuasaan kepala pemerintahan masa demokrasi dipimpin Soekarno telah menyalahi prinsip-prinsip Islam, baik terhadap nilai keadilan (*al-adālah*), kesamaan (*al-musawah*), terutama dalam nilai *syūrah* (musyawarah) dan amanat, serta adanya penyelewengan terhadap prinsip kebebasan (*al-hurriyah*). Karena selama era demokrasi dipimpin Soekarno semua kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara terlihat tidak ada jaminan dalam kekuasaannya, karena selalu ada upaya campur tangan (intervensi) eksekutif dalam setiap kebijakan demi kepentingan pimpinan eksekutif. Artinya lembaga-lembaga tinggi negara tidak memperlihatkan eksistensi dan independensi kekuasaannya yang bebas merdeka.

B. Saran-saran

Islam adalah agama *rahmatan lil 'ālamīn*, telah memberikan dasar-dasar aturan kepada manusia dalam menjalankan semua aspek kehidupan, termasuk

bagaimana seorang manusia hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Dan bagi penguasa agar memperhatikan amanat yang diberikan oleh rakyat serta menegakkan keadilan, maka ketika itu kepala negara berhak untuk mendapatkan kepercayaan dan ketaatan penuh dari seluruh rakyat, singkatnya, rakyat wajib mentaati dan menolong kepala negara. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Swt yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ¹

Kekuasaan Presiden selaku kepala pemerintahan harus menjalankan pemerintahannya dengan adil, bertanggungjawab dan amanah, di mana nasib bangsa ini berada di tangannya, rakyat mendukung segala program pemerintah yang berpihak dan menguntungkan bagi rakyat secara keseluruhan, bukan karena kepentingan individu, kelompok, golongan maupun jabatan yang diberikan rakyat kepada penguasa (Presiden) adalah amanat.

Oleh karena itu, bagi mereka yang tertarik pada kajian terhadap sejarah ketatanegaraan terutama pada kekuasaan kepala pemerintah era demokrasi dipimpin Presiden Soekarno (1959-1965). Hendaknya dikembangkan cakupan arah kajiannya, sehingga kesimpulan-kesimpulan yang diambil dapat dikatakan lebih berbobot.

Akhirnya, kepada semua pihak, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan, sebagai langkah perbaikan dimasa yang akan datang.

¹ An-Nisa (4): 59



**KEKUASAAN KEPALA PEMERINTAHAN
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN PRESIDEN SOEKARNO (1959-1965)
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Jumanatul Ali Art, 2005.

B. Hadis

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah, *Sahih al-Bukhari*, Kairo : Dar al-Fikr, Jus VIII.

C. Fiqih

Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, cet. ke-1 Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqh Islam*, cet. Ke-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1971.

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah"*, cet. ke-1. Bandung: Prenada Media, 2003.

Hasjmi, *Dimana Letak Negara Islam*, Banda Aceh: tnp, 1967.

Jasilatul Helmiyah, Jasilatul, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Konsep Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Khan, Qomaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, Terj. Anas Wahyudin ; penyunt. Ammar Haryono, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka, 1983.

Maududi, *Politik Alternatif "Suatu Perspektif Islam"*. Terj. Moh Nor Hakim Jakarta: Gema Insani, 1999.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Politik "Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965,"* Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Mawardi, Abi Hasan Ali Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi al-, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah Wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

- _____, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998.
- Muhajir, Ahmad, *Demokrasi Terpimpin menurut Idham Khalid Perspektif Fiqih Siyasah*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta, (2005).
- Nugraha, Panji Ruhiat, *Dekret Presiden dalam HTN di Indonesia ditinjau dari Perspektif fiqh Siyasah*. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta, (2003).
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada kerjasama dengan LkiS, 1999.
- Rahmat, O.K, *Republik atau Monarki "Alternatif Di Dalam Undang-undang Perlembagaan Islam"*, cet. ke-1, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd 100 Beach Road #13-11 Shaw Tower, 1989.
- Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al Kattani ; penyunting Euis Erinawati. Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Sadzali, H. Munawir, *Islam dan Tata Negara "ajaran sejarah dan pemikiran"* Edisi V. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1993.
- Syafeii, Inu Kencana, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Taimiyah, Ibnu Taqiuddin, *Siyasah Syar'iyah "Etika Politik Islam"* Risalah Gusti, 1995.
- Yuli Naswati. "Konsep dan Wewenang Dalam Kekuasaan Politik Islam Menurut Muhammad Arkoun" Fakultas Syari'ah jurusan Jinayah Siyasah IAIN Sunan kalijaga, 1999.
- Zallum, Abdul Qadim ,An-Nabhani, *Sstem Pemerintahan Islam*, alih bahasa M. Maghfur W, Jakarta: Al-Izzah, 2002.
- Zuhri, M, *Potret Keteladanan "Kiprah Politik" Muhammad Rasulullah*, cet. ke-1 Yogyakarta: LESFI, 2004.

D. Kelompok Buku Lain

- Alam, Tunggul. Wawan, *Bung Karno Demokrasi Terpimpin, Milik Rakyat Indonesia*. Edisi ke-2, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Ali, Mukti, "Penelitian Agama (Suatu Pembahasan Metode dan Sistem), *Jurnal al-Jami'ah*, No. 31-33 Tahun 1984, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1984.
- Al-Rasid, Harun, *Pengisian Jabatan Presiden*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Amin, S.M, *Indonesia Di Bawah Rezim "Demokrasi Terpimpin"*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Andrain, Charles F. *Kehidupan Politik Dan Perubahan Sosial*. Terj Lukman Hakim, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Aziz, A, Gaffar *ad-Din wa as-Siyasah fi ad-Adyan (Berpolitik untuk Agama: Misi Islam, Kristen, dan Yahudi tentang Politik)*. Penerjemah Ilyas Siraj, cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Bakker, Anton, dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi penelitian Filsafat*, cet. ke-3, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. ke-20, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Cipto, Bambang, *Presiden, Partai dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2 Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Gani, Ismail, Sulistyati, *Pengantar Ilmu Politik*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia "Transisi Menuju Demokrasi"*. cet. ke-5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, Desertasai*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

- Hermawan, Emon, *Politik Membela Yang Benar: Teori, Kritik dan Nalar*, Yogyakarta: Klik@, 2001.
- Kansil, CST, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Aksara baru, 1985.
- Mahendra, Yusril Ihza, "Maududi dan Jama'at al-Islami", *Pembentukan dan Tujuan Partai Fundamental*, dalam jurnal *Ulumul Qur'an* No 3 Vol. IV/1993.
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Gusdur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- M.D, Moh. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- _____, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, cet. ke-1. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- MM, Darmawan, *Sukarno Bapak Bangsa Indonesia*, cet. ke-1. Bandung, CV. Hikayat Dunia, 2005.
- Moleong, Lexi. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-17. Bandung: Rosida Karya, 2002.
- Mulyosudarmo, Suwoto, *Peralihan Kekuasaan "Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara"*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Gramedia, 1997.
- Munawir, A. Warson, *Kamus Al-Munawir* Surabaya: Pustaka Progresif 1997.
- Nudroh, Siti *Wacana Keagamaan dan Politik Nurkhalis Madjid*, cet. ke-I, Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- Sudibyo, Agus, *Citra Bung Karno "Analisis Berita Pers Orde Baru"*, cet. ke-1 Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1999.
- Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I. Cet. ke-3, Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964.
- Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi ke-4 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990.
- Soehino, *Hukum Tatanegara Sumber-Sumber Hukum Tatanegara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif "Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)"*. ket. ke-1 Malang: UMM Pres, 2003.
- Suny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, cet. ke-4. Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Suprpto, Bibit *Perkembangan Kabinet Dan Pemerintahan Di Indonesia*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1985.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 1988.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA